

ANALISIS TERHADAP SISTEM POLITIK INDONESIA SEBELUM PEMILIHAN UMUM 2024 BERDASARKAN PANDANGAN NICCOLO MACHIAVELLI TENTANG MORALITAS DAN POLITIK KEKUASAAN

Sarviano Olgarinus Jendri¹, Yanuarius Juliano Sukardi², Oktavianus Jadur³,
Yohanes Viktorius Kea Sa⁴
sarvianojendri@gmail.com¹, sukardiyano55@gmail.com², yianjadur8@gmail.com³,
viktoriuskeasa@gmail.com⁴

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melihat kembali sistem politik Indonesia sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, kuantitatif dan studi pustaka. Dalam sistem politik Indonesia sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 tampak adanya pro dan kontra karena adanya pemisahan secara sengaja antara moralitas dan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa. Hal yang sama pernah disinggung oleh Niccolo Machiavelli yang mengatakan bahwa seorang penguasa bisa saja mengabaikan nilai-nilai moral dalam kepemimpinannya asalkan negara tetap kokoh kuat berdiri dan tidak rusak oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Namun, apakah pernyataan Machiavelli ini masih relevan dengan situasi Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila? Tentu hal ini cukup bertentangan karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan etika dan moralitas sebagai suatu bangsa.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, pemisahan, Moralitas, Kekuasaan, Demokrasi Pancasila.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to look back at the Indonesian political system before the 2024 presidential and vice presidential general elections. The methods used in this article are qualitative, quantitative and literature study methods. In the Indonesian political system before the 2024 general election for president and vice president, there appear to be pros and cons because of the deliberate separation between morality and power carried out by the rulers. The same thing was mentioned by Niccolo Machiavelli who said that a ruler could ignore moral values in his leadership as long as the country remained firmly established and was not damaged by external influences. However, is Machiavelli's statement still relevant to the situation in Indonesia which adheres to the Pancasila democratic system? Of course, this is quite contradictory because Indonesia adheres to the Pancasila democratic system which prioritizes ethics and morality as a nation.

Keywords: General Election, President, separation, Morality, Power, Pancasila Democracy.

PENDAHULUAN

Bagi negara-negara di berbagai belahan dunia, sudah pasti tidak asing apabila mendengar bahwa ada suatu negara di Asia Tenggara yang bernama Indonesia. Betapa tidak, negara Indonesia terkenal dengan sistem demokrasinya yang hendak menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan tertinggi negara Republik ini berada di tangan rakyatnya. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan perjalanan panjang bangsa ini. Tentu perjalanan panjang itu tidak terlepas dari sejarah masa lampau yang masih sangat membekas dalam diri setiap anak bangsa. Pergolakan yang terjadi di masa orde baru mulai dari masa jayanya kepemimpinan otoriter Soeharto selama 32 tahun hingga berakhirnya

pada tragedi 1998 sudah cukup membuktikan bahwa keadaan demokrasi sudah sejak dahulu menghadapi tantangan-tantangan besar yang amat berarti. Masa Orde Baru mulai muncul pada tahun 1966 di mana masyarakat Indonesia mengalami situasi sulit karena menghadapi dua corak model tingkah laku politik yang bisa dilihat ekstrem. Dua corak tingkah laku tersebut adalah adanya kebebasan politik para penguasa yang tiada batas sehingga melahirkan konflik dan penekanan kebebasan berekspresi dalam politik sehingga aksi kritik dari masyarakat dibungkam.¹ Makna terdalam dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seakan tidak dimaknai secara mendalam ketika melihat perilaku para pemimpin yang terus-menerus keliru dalam menggunakan mandat yang dipercayakan oleh rakyat. Setelah runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto, perjalanan demokrasi perlahan mulai membaik. Sistem demokrasi yang terwujud melalui pemilihan umum langsung tahun 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keluar sebagai presiden terpilih kala itu, seakan menjadi awal yang baru dari sistem demokrasi Indonesia². Sebab pemilihan umum memang sudah dimulai sejak tahun 1955 dan jika dihitung telah terjadi 12 kali pemilihan umum yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.³ Dari sekian banyak pengalaman pemilihan umum tersebut, pemilihan umum tahun 1995 dan 2004 memiliki kekhususan dan keistimewaannya tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vaccum*, melainkan berlangsung dalam situasi lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri.⁴ Artinya ada indikasi campur tangan dari pihak berkuasa dan berkepentingan dalam memenangkan pemilihan umum. Memang dapat diakui pula bahwa pemilihan umum-pemilihan umum tersebut dilakukan masih dalam rangka mencari kira-kira sistem pemilihan umum yang mana yang cocok dan sesuai dengan Indonesia.

Setelah pemilihan umum 2004 terus berlanjut ke pemilihan umum-pemilihan umum berikutnya yang terjadi pada tahun 2009, 2014 dan 2019. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menang pada pemilihan umum 2004 dan 2009 sehingga menjadi presiden dalam dua periode. Pada 2014 dan 2019 presiden Joko Widodo memenangkan pemilihan umum dan berkuasa menjadi presiden selama dua periode. Jika dilihat dari program kerja dan pemerataan di segala bidang, pemerintahan presiden Joko Widodo adalah pemerintahan yang sangat baik. Visi 'Indonesia Maju' yang beliau gagaskan sejak pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 telah berhasil membujuk hati rakyat. Ditambah lagi Joko Widodo bukan merupakan keturunan dinasti berdarah biru atau anak pejabat besar tetapi ia adalah anak rakyat biasa sehingga dapat dipastikan sudah tahu banyak tentang apa yang dialami oleh rakyat dari lapisan terkecil sampai lapisan terbesar termasuk para pejabat. Selain itu, selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden rakyat merasa sangat diperhatikan. Pembangunan infrastruktur terjadi merata di setiap provinsi termasuk di provinsi-provinsi yang belum pernah disentuh pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan sebelumnya. Bantuan-bantuan pun selalu digelontorkan baik di bidang sosial-ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di tengah kemajemukan dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbedaan suku, ras, agama dan antar-golongan terus terjadi, presiden Joko Widodo hadir sebagai penengah dan membuat

¹ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1978), hlm. 89.

² Riza Fathoni, "Arsip Foto "Kompas" : Pemilu 2004, Pilpres Langsung Pertama Indonesia", *Kompas*, 30 Desember 2023.

³ Tim Infografik, "Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa", *Kompas*, 13 Februari 2024.

⁴ Miariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 473.

semuanya tetap aman. Di ranah pemerintahan, ia tidak segan-segan memasukkan para penjahat seperti koruptor ke dalam penjara. Hubungan diplomasi dengan negara lain pun terjaga dan terus meningkat. Indonesia semakin dikenal karena Joko Widodo mampu membawa negara ini ke arah puncak kejayaan. Presiden yang sederhana dan merakyat sangat dicintai oleh semua masyarakat dan juga disegani oleh sesama pejabat dan oleh negara-negara lain. Tidak jarang Indonesia dipercaya untuk menakhodai berbagai organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Joko Widodo mengidealkan Indonesia emas 2045. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa dalam kurang lebih satu dekade pemerintahan presiden Joko Widodo tersebut tantangan dalam mewujudkan negara demokratis sangat terasa tetapi presiden Joko Widodo tetap tenang dan lihai dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pemerintahan presiden Joko Widodo yang sangat disayangi oleh rakyatnya itu tetap berjalan mulus sampai selesai masa jabatannya sebagai presiden? Apakah ia mengakhiri masa jabatannya dengan tetap memperhatikan makna terdalam demokrasi? Apakah ia tetap memperhatikan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa ini?

Pada tahun 2024 ini adalah tahun di mana presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Sungguh suatu peristiwa yang amat mengecewakan terjadi di pengujung masa jabatannya ini. Ia malah menggunakan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Hal ini berkaitan dengan keterlibatan Joko Widodo dalam proses pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Rupanya ia tidak ingin melepas kekuasaannya begitu saja. Demi kepentingan pribadi ia rela mengubrak-abrik sistem demokrasi dan melecehkan moralitas bangsa ini. Kasus ini bermula terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu peraturan berkenaan dengan batasan umur calon presiden dan calon wakil presiden yang ujung-ujungnya hendak meloloskan anak presiden Joko Widodo yaitu Gibran Raka Buming Raka. Segala upaya dilakukan agar pemilihan umum itu dimenangkan oleh pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Semakin nyata bahwa presiden Joko Widodo terlibat dalam perilaku nepotisme. Sistem politik kedinastian semakin terlihat apalagi ketua Mahkamah Konstitusi adalah suami dari saudarinya sendiri.⁵ Praktik pembagian bantuan sosial berupa beras dan bantuan-bantuan sosial lainnya pun digelontorkan sebelum dilaksanakan pemilihan umum 2024. Dan anehnya jumlah dana yang dikeluarkan pada saat pandemi covid-19 lebih kecil angkanya ketimbang dana yang digunakan untuk bantuan sosial yang dilakukan secara serentak itu. Lalu timbul rumor dikalangan public bahwa ini salah satu langkah Joko Widodo untuk melanggengkan pencalonan anaknya sebagai wakil presiden di pemilihan umum 2024.

Jika bertolak dari kenyataan ini, tampak terlihat bahwa kepentingan pribadi penguasa sangat diutamakan ketimbang kepentingan masyarakat secara kolektif. Demokrasi dan moralitas bangsa Indonesia mengalami kemerosotan. Presiden malah menggunakan kekuasaannya dan mengabaikan hal-hal moral dalam hidup berbangsa. Rupanya ada pemisahan antara moralitas dan politik kekuasaan. Berbicara tentang pemisahan nilai moral dan kepentingan politik ini, pernah juga disinggung oleh seorang tokoh politik terkenal yang berasal dari Italia yang bernama Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli adalah seorang diplomat, penasihat raja, filsuf dan sejarawan.⁶ Machiavelli berpandangan bahwa penguasa bisa melakukan apa saja yang membuat negara tetap aman

⁵ Ahmad Sahde, "Jokowi, dari Kesempurnaan Demokrasi Menuju Politik Dinasti", *Kompas*, 3 November 2023, hlm. 6-7.

⁶ Quentin Skinner, *Machiavelli : Dilema Kekuasaan dan Moralitas*. Terj. Burhan Wirasubrata (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. vii.

dan stabil sekalipun hal itu tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku di tengah masyarakat. Harus ada pemisahan yang tegas antara prinsip-prinsip moral, etika dan prinsip-prinsip ketatanegaraan. Karena itu bidang politik tidak perlu mempertimbangkan tentang baik dan buruk menurut bidang moral.⁷ Pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyebab sehingga Niccolo Machiavelli berpandangan bahwa aspek moralitas mesti dipisahkan dari kehidupan berpolitik penguasa? Dan apa hubungannya dengan sistem politik Indonesia sebelum pemilu umum 2024? Beberapa pertanyaan ini akan dijawab dalam pembahasan berikut ini.

METODE

Metode yang dipakai oleh para penulis adalah metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis suatu masalah berdasarkan studi pustaka. Para penulis mencoba menghubungkan teori-teori yang ada dengan persoalan atau fakta yang terjadi. Beberapa buku dan jurnal digunakan sebagai sumber rujukan.

Tentu dalam hal ini sangat dibutuhkan daya berpikir kritis dari para penulis agar menemukan titik temu antara persoalan terkini dengan konsep yang sudah ada dalam sumber-sumber yang dipakai sehingga menghasilkan suatu sudut pandang baru dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riwayat Singkat Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli lahir di Florence pada tanggal 3 Mei 1469. Ia lahir pada masa pemerintahan Lorenzo Agung (1464-1492). Ayahnya seorang yang ahli di bidang hukum mereka hidup sebagai keluarga yang kaya. Machiavelli bisa menikmati pendidikan yang terbaik di Florence pada waktu itu, karena ayahnya menginginkan agar kelak Machiavelli menjadi seorang teknokrat, sedangkan ibunya berbeda pendapat sebab ia lebih merindukan agar anaknya itu menjadi imam atau rohaniwan. Tetapi Machiavelli sendiri kemudian berkembang menjadi seorang politikus dengan ide-ide yang konkret, praktis dan peka terhadap prioritas-prioritas tindakan.⁸ Pengganti Lorenzo, yang meninggal tahun 1492, adalah putranya Pietro de' Medici. Penguasa ini memerintah jauh di bawah standar manajemen kekuasaan ayahnya. Situasi kota Florence mulai bergejolak, terutama oleh gerakan reformasi spiritual pemimpin biara Dominikan kota Florence, Savoranola. Kejadian-kejadian politik pada waktu itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Machiavelli. Ia menyaksikan runtuhnya kekuasaan keluarga Medici yang sudah memerintah negara Florence selama beberapa generasi sekitar seratus tahun. Dari tahun 1498-1512, sesudah rezim teokratis Savoranola digulingkan, berdiri Republik Florence dengan Soderini sebagai penguasa yang baru. Soderini adalah teman dekat Machiavelli, sehingga ketika Soderini memerintah, Machiavelli yang ketika itu berumur dua puluh sembilan tahun dilantik menjadi sekretaris merangkap anggota Majelis Sepuluh, sebuah badan penasihat presiden. Kegiatan diplomasi sangat penting, karena keluarga Medici yang melarikan diri ke Spanyol sedang berusaha untuk kembali menguasai Florence. Machiavelli diutus oleh Soderini untuk pelbagai kegiatan misi diplomatik. Ia sering bertemu dan bertukar pikiran dengan Cesare Borgia, sang pangeran dari Valentino, putra dari hasil perkawinan gelap Paus Alexander VI (yang memerintah dari tahun 1492-1503). Namun berbagai rencana yang telah dibuat Machivelli dan Cesare Borgia tidak dapat

⁷ Niccolo Machiavelli, *Il Principe (Sang Penguasa)*. Terj. Agus Purwanto (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. xxxii.

⁸ *Ibid.*, hlm., xiv.

diteruskan. Cesare Borgia sangat terpukul karena Alexander VI, ayahnya itu meninggal dunia pada tahun 1503. Sementara pengganti ayahnya adalah Paus Julius II yang berkeinginan untuk merubah kerajaan menjadi kepausan dan mengusir keluar Cesare Borgia. Pada 1512 Florence kembali dikuasai keluarga Medici, Soderini dan Machiavelli pun disingkirkan. Dengan situasi baru ini maka Machiavelli berkeinginan meneruskan kariernya sebagai aktivis politik, pekerjaan tiap harinya adalah menulis dan berpikir (1512-1527).⁹ Ia menulis banyak hal termasuk dua di antaranya adalah *Il Principe* dan *Discorsus*.

Pandangan Machiavelli Tentang Pemisahan antara Moralitas dan Politik Kekuasaan

Dalam situasi yang serba kacau di bidang religius dan situasi pecah belah di bidang moralitas publik, maka bagi Machiavelli persoalan kekuasaan yang diutamakan bukan soal sah atau tidaknya secara moral melainkan bagaimana kekuasaan yang tidak baik-baik saja itu menjadi stabil dan aman kembali. Pandangannya tentang politik sangat bertolak belakang dengan dengan pandangan tradisional pada zaman itu yang menganggap bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah untuk mewujudkan dan memelihara nilai keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Rupanya pandangan tradisional itu tidak lagi relevan dengan praktek kekuasaan yang dia saksikan dan dialaminya sendiri ketika dia hidup. Selain itu dia merasa tidak cocok dengan praktek politik pada masa kekaisaran Romawi yang sedang sejahtera dan berjaya.¹⁰

Dengan membayangkan cita-cita dan praktek kekuasaan dari Cesare Borgia dan Paus Alexander VI, Machiavelli mengatakan bahwa tugas pemerintah yang sebenarnya adalah mempertahankan serta mengembangkan dan mengekspansikan kekuasaan, kaeran itu dibutuhkan kekuatan sebagai unsur integral dan elemen paling esensial dalam politik. Machiavelli sepertinya menganut sinisme moral yang disinggung dalam filsafat politik. Sebab ia mati-matian berpendapat bahwa penguasa itu bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan nilai moral. Seorang penguasa betul-betul berusaha agar negara tetap dalam keadaan aman, eksis dan stabil di saat adanya serangan ataupun ancaman dari luar. Kepentingan pertahanan dan perluasan kekuasaan mesti tetap terjaga dan terselamatkan dari segala macam ancaman. Dalam mengambil tindakan, maka pertimbangan yang dilakukan oleh penguasa petama-tama tidak bertolak dari kemauan atau usulan rakyat, apakah tindakan yang akan diambil itu dinilai oleh masyarakat baik atau buruk, tetapi bertolak dari segi efisiensi secara politik. Pilihan-pilihan tindakan tergantung dari tuntutan keadaan dan desakan situasi sosial.¹¹

Yang sudah menerapkan pola manajemen kekuasaan secara baru, dan memisahkan tindakan politik dari kerangka penilaian moral adalah Cesare Borgia. Tindakan-tindakan politis Borgia merupakan ilustrasi ideal dalam prosedur yang benar untuk menegakkan kekuasaan bagi para penguasa. Sebagai contoh prosedur menegakkan kekuasaan, misalnya bagaimana caranya seorang penguasa baru menegakkan kekuasaan di suatu wilayah yang baru dikuasainya? Machiavelli mengatakan bahwa keluarga dari penguasa wilayah sebelumnya harus dimusnahkan. Kekejaman dapat dimanfaatkan dan dipraktekkan oleh penguasa atas desakan keadaan dan tuntutan situasi untuk menguasai sepenuhnya suatu wilayah baru karena semua ancaman atas kekuasaan dapat diatasi dan dilenyapkan. Seandainya kekuasaan sudah stabil dan digenggam erat dalam tangan penguasan, maka langkah politik yang berikut adalah menarik simpati rakyat dengan pelbagai bantuan. Dengan demikian filsafat politik Machiavelli bertolak dari desakan keadaan dan tuntutan

⁹ *Ibid.*, hlm. xx-xxvi.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. xxx.

¹¹ *Ibid.*, hlm. xxxii.

situa serba kacau sehingga menimbulkan kemungkinan besar suatu ketidakstabilan kekuasaan. Maka tujuan utama berpolitik bagi penguasa adalah mengamankan kekuasaan yang ada pada tangannya. Machiavelli membatasi perhatian pada teknik perebutan dan pertahanan kekuasaan. Dia mengulas masalah praktis ini dengan sinisme moral yang keras. Baginya politik dan moralitas merupakan dua bidang yang terpisah dan tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Dalam urusan politik, tidak ada tempat membicarakan masalah moral. Hanya satu hal yang penting ialah bagaimana meraih sukses dengan memegang kekuasaan. Kaidah etika politik alternatif bagi Machiavelli adalah: tujuan berpolitik adalah memperkuat dan memperluas kekuasaan. Segala usaha untuk menyukseskan tujuan itu dapat dibenarkan. Legitimasi kekuasaan membenarkan segala teknik pemanipulasian dukungan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Dia seolah-olah membenarkan persaingan antara para pemimpin mafia yang saling merebut hegemoni kekuasaan. Pemerintah yang ideal perlu menghindari tindakan-tindakan yang bersifat setengah-setengah.

Pemisahan tegas antara prinsip-prinsip moral, etika dan prinsip-prinsip ketatanegaraan didasarkan pada adanya perbedaan antara moral dan tata susila dan kehidupan ketatanegaraan. Moral dan tata susila merupakan suatu kemungkinan yang diharapkan, sedangkan ketatanegaraan adalah suatu kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kenyataan memang harus dibedakan dari suatu kemungkinan yang diharapkan. Karena itu bidang politik tidak perlu memperhatikan bidang moral. Tujuan politik jauh lebih nyata dari tujuan moral dan negara harus mengejar tujuan-tujuan nyatanya. Karena tidak ada nilai etis dalam kehidupan politik, maka seorang penguasa dapat saja memutuskan dan melanggar perjanjian yang pernah diucapkan baik kepada rakyatnya maupun kepada negara-negara tetangganya. Dalam situasi perang antara dua kekuatan besar, penguasa suatu negara jangan bersikap netral, tetapi harus memihak kepada negara yang lebih kuat dan diperhitungkan akan memenangkan peperangan. Pemihakan kepada calon pemenang membuka kemungkinan yang lebih menguntungkan bagi penguasa dan negaranya, karena pemenang akan menghargai sikap memihak itu. Penguasa yang mahakuasa kelihatannya tidak suka bila dirinya dikelilingi oleh barisan kompetitor, karena para diktator tidak suka adanya orang kuat yang lain berada disampingnya. Tetapi sebaliknya orang kuat itu secara tak sadar membutuhkan simulasi dari orang kuat saingan beratnya. Menurut Machiavelli, negara yang kuat tidak cukup diperintah oleh sekelompok pemimpin dengan bakat "*mediocre*" dan tidak memanfaatkan kekuatan oposisi. Negara yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat untuk menyempurnakan pola manajemen kekuasaannya, karena tujuan terakhir dari perjuangan sang penguasa adalah kemuliaan dirinya sendiri.¹²

Perbandingan Antara Sistem Politik Indonesia Sebelum Pemilihan Umum 2024 Dengan Pandangan Machiavelli Tentang Pemisahan Moralitas dan Politik Kekuasaan.

Jika melihat sistem politik Indonesia sebelum pemilihan umum 2024 dapat dipastikan bahwa adanya indikasi bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Adanya campur tangan pemerintah dalam usaha memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, sudah cukup membuktikan bahwa politik kotor telah merasuki jiwa penguasa negeri ini. Presiden Joko Widodo tidak mampu menjaga netralitas sebagai pemimpin negara. Demokrasi tampak mengalami kemerosotan. Demokrasi yang sebenarnya bisa menjamin hak dan kebebasan setiap orang kini tidak diperhatikan lagi. Semua masyarakat Indonesia sangat menghargai peraturan yang

¹² *Ibid.*, hlm . xxxiii.

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma atau hukum yang mengikat hidup bersama dan bisa menjamin bahwa semua orang akan taat terhadap norma dan hukum itu. Namun, berbeda konsep dengan perubahan norma dan hukum yang terjadi sebelum pemilihan umum 2024 karena adanya isu memenuhi kepentingan pribadi penguasa. Presiden Joko Widodo tampak belum rela turun secara ikhlas dari kursi kepresidenan. Hal ini terlihat dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Padahal jika ditelusuri secara mendalam, perubahan Undang-Undang ini hanya untuk melanggengkan pencalonan Gibran Sebagai Wakil Presiden 2024. Dalam bukunya yang berjudul *Discoursus*, Machiavelli menegaskan bahwa pendiri pemerintahan seharusnya merupakan orang yang sangat bijak dan cakap sehingga tidak mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya.¹³ Ini sebetulnya tamparan samping dari Machiavelli untuk pemerintahan Joko Widodo yang berlaku tidak bijaksana.

Untuk mengerti dengan baik pandangan Machiavelli, maka perlu untuk memahami isi kedua bukunya yaitu *Il Principe* atau Sang Penguasa dan *Discoursus* atau diskursus. Pertama tentang isi buku *Il Principe* atau Sang Penguasa, pembaca harus memperhatikan satu hal penting yaitu berkaitan dengan konteksnya. Saat Machiavelli menulis buku *Il Principe*, Italia sedang menjadi rebutan antara negara Spanyol dan Prancis sehingga daerah-daerah di Italia dibuat tidak aman oleh pasukan-pasukan liar yang berkeliaran. Pusat perhatian Machiavelli adalah bagaimana kekacauan dan ketidaknyamanan itu dapat diakhiri. *Il Principe* hendak memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seorang penguasa dapat mengendalikan kekuasaannya dan dengan demikian menciptakan dasar untuk membangun kenegaraan yang kokoh. Buku Machiavelli yang kedua, yang baru terbit sesudah ia meninggal yaitu *Discoursus* atau Diskursus. Dalam buku ini menjadi jelas apa yang sebenarnya menjadi motivasi Machiavelli yakni hendak mengembalikan kekuatan dan kedaulatan Italia dan untuk itu ia mengacu pada keperkasaan Republik Roma Kuno. Minat sebenarnya Machiavelli bukanlah kemantapan kekuasaan penguasa, melainkan kemantapan negara republik yang hanya dapat dibangun sesudah kekacauan berakhir. Agar negara menjadi mantap rakyat sendiri harus mantap, harus berpartisipasi dalam mengurus negara. Kekuatan negara bukan tergantung hanya dari kemampuan penguasa, melainkan juga dari kemampuan rakyat. Kata kunci dari kedua buku tersebut adalah *virtu* atau keutamaan.¹⁴ Tetapi dalam hal bukan merujuk kepada nilai moral. Machiavelli tidak pernah berpikir tentang kejujuran, kebaikan hati atau keadilan melainkan kekuatan tekad, keberanian, kemampuan untuk bertindak tanpa ragu-ragu sesuai dengan apa yang diyakini.¹⁵ Dapat dilihat bahwa Machiavelli meyakini adanya nasib mujur dari penguasa itu sendiri. Jika memahami kedua buku

Jika melihat pandangan Machiavelli tentang moralitas dan politik kekuasaan, dapat dipahami bahwa sebenarnya ia hendak mendobrak aturan-aturan atau norma-norma umum yang berlaku pada saat itu, di mana ia secara terbuka mengabaikan batasan etika dan moralitas yang telah lama menjadi pegangan golongan moralis klasik. Pola pikir kekuasaan yang dikembangkan Machiavelli yang walaupun secara substantif menunjukkan sifat patriotik dan kepedulian yang mendalam terhadap segi-segi keberadaan

¹³ Niccolo Machiavelli, *Diskursus*. Terj. Yudi Santoso dan Sovia VP (Yogyakarta: Penerbit Bentang Budaya, 2003), hlm. 41.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 180.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

kekuasaan dalam jangka panjang, serta kehormatan negara, tetapi dalam prakteknya menjadi terobosan baru yang menunjukkan adanya relasi tak terpisahkan antara nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Dengan demikian tidak mudah bagi setiap pribadi untuk memahami dan mengahayatnya dalam hidup setiap hari. Dalam hal ini gagasan politik Machiavelli seakan menjadi argumen pembena bagi penguasa-penguasa tamak yang tidak segan dan malu mempertontonkan nafsu keserakahannya dan perilaku kekuasaan yang penuh tipu daya muslihat.¹⁶

Para penguasa di Indonesia sekarang sudah terjebak dalam dampak buruk perspektif Machiavellian. Adanya penafsiran yang keliru terhadap pandangan Machiavelli. Pemisahan moral dan etika dari politik kekuasaan sangat bertolak belakang dengan latar belakang Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar pijakan utama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Machiavelli tidak dapat direduksikan dianggap sekadar seorang ahli rekayasa kekuasaan pribadi. Machiavelli memang membenarkan, bahkan seperlunya menuntut, pemakaian kebrutalan dan kecurangan demi untuk menstabilkan kekuasaan. Akan tetapi, sesudah keadaan darurat teratasi dan kekuasaan penguasa telah mantap, undang-undang yang baik dan rakyat yang memiliki *virtu* atau keutamaan merupakan tulang punggung kemantapan negara. Mendasarkan kekuasaan terus-menerus atas kecurangan dan kebrutalan dalam perspektif Machiavelli bukanlah tanda keberhasilan, melainkan tanda kegagalan penguasa karena akan berarti bahwa ia tidak berhasil untuk mengatasi keadaan darurat. Tanda penguasa yang berhasil adalah bahwa ia tidak perlu menindas lagi dengan tangan besi.¹⁷ Negara Indonesia tidak cukup menjadi aman bila hanya mengandalkan kekuatan militer saja. Penguasa bertangan besi dan haus akan kuasa tidak boleh dibiarkan hidup di negeri ini. Sebab latar belakang budaya dan nilai-nilai moral yang sudah tertanam dalam diri setiap masyarakat sejak dahulu kala sudah berhasil mengantar bangsa ini terus bertahan dan maju.

Demokrasi Pancasila dan Kekuatan Moral dalam Hidup Berpolitik di Republik Indonesia.

Demokrasi Indonesia harus bisa menunjang terwujudnya lima sila Pancasila baik secara yuridis-institusional maupun dalam praktek kehidupan politik praktis. Pendasaran kehidupan demokrasi Indonesia adalah pada Pancasila, itu berarti bahwa segenap keputusan mayoritas harus menunjang lima sila itu dan tidak pernah boleh dipakai untuk menyangkalnya. Pancasila menjamin bahwa demokrasi Indonesia betul-betul mewujudkan kekeluargaan seluruh bangsa, dalam keadilan, dan dalam hormat terhadap harkat segenap warga masyarakat sebagai manusia.¹⁸ Sebetulnya ketika semua lapisan masyarakat dan penguasa di Indonesia bisa memahami arti dan makna terdalam dari demokrasi Pancasila pasti akan menemukan bahwa ajaran moral dan etika kebangsaan sudah terdapat di sana. Negara Indonesia bukanlah negara kerajaan sehingga bisa diterapkan sistem politik dinasti. Negara ini adalah negara republik yang menganut sistem demokrasi. Itu artinya semua orang bertanggung jawab atas kemajuan dan keamanan bangsa ini. hak asasi dan kebebasan sebagai manusia Indonesia mesti dijamin.

Ilmu politik di negeri ini tentu mempelajari kehidupan sosial manusia beserta etika di dalamnya. Etika memastikan bagaimana semuanya itu seharusnya menurut hak-hak dan kewajiban manusia. Mempelajari hukum mungkin lebih dekat hubungannya

¹⁶ Mohammad Maiwan, "Antara *Virtue* dan *Fortune*: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli" *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19 : 1 (Jakarta : OKTOBER 2019), hlm. 58.

¹⁷ Franz Magnis-Suseno, *op.cit.*, hlm. 181.

¹⁸ Quentin Skinner, *op.cit.*, hlm. 67.

dengan etika daripada ilmu-ilmu lainnya.¹⁹ Itu artinya betapa pentingnya etika dalam kehidupan bernegara. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan bangsa Indonesia pada etika dan moralitasnya? Jawabannya adalah tingkatkan kesadaran dan tanggungjawab para elit politik di negeri ini. Sebab mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sehingga mereka tidak seperti rakyat biasa yang setiap hari bersusah payah untuk bertahan hidup. Para elit politik memiliki keluasaan kesempatan untuk menentukan sendiri gaya hidup mereka. Mereka yang berkuasa semestinya berdiri di atas pilar-pilar demokrasi Pancasila.²⁰ Dengan melihat latar belakang budaya yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sebetulnya bangsa Indonesia dapat memastikan bahwa budaya itu mesti tetap lestari sehingga tidak menjadi kacau seperti tercerabut dari akarnya. Kemajemukan budaya, agama, suku dan perbedaan golongan lainnya sudah cukup menjadi alasan mengapa kita mesti menjunjung tinggi moralitas bangsa ini.

KESIMPULAN

Konteks demokrasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain. Niccolo Machiavelli menyampaikan pendapatnya tentang pemisahan antara moralitas dan politik kekuasaan karena sesuai dengan konteks negaranya waktu itu. Siapa pun di bangsa ini tidak bisa mempersalahkan Machiavelli. Machiavelli menyampaikan gagasan tersebut karena ia melihat bahwa negaranya dalam keadaan tidak aman dan terancam. Situasi perang pun terjadi dan masyarakat masih kaku dengan pandangan tradisionalnya bahwa prinsip moral perlu dijunjung tinggi. Namun, bagi Machiavelli pandangan tradisional ini tidak lagi relevan. Penguasa mesti mengambil alih kekuatan negara walaupun itu mengabaikan prinsip moral yang berlaku di tengah masyarakat dengan satu catatan bahwa tujuan dari penguasa itu adalah untuk mengembalikan kekuatan dan keamanan negara dari segala ancaman yang datang dari luar. Setelah negara kembali dalam keadaan yang stabil kembali maka sang penguasa mesti kembali mengutamakan kepentingan masyarakat. Beda kasus dengan yang terjadi dengan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024. Negara tetaplah dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada ancaman dari negara manapun. Indonesia sangat menjunjung tinggi prinsip moral karena berangkat dari latar belakang budaya masyarakat yang majemuk. Semua orang bebas untuk terlibat dalam urusan politik. Artinya bebas untuk memilih dan bebas pula untuk dipilih. Hak asasi manusia semestinya dijunjung tinggi. Namun, peristiwa pelecehan terhadap otoritas Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan penuh presiden Joko Widodo untuk melanggengkan anaknya menjadi wakil presiden sudah membuktikan bahwa ada indikasi nepotisme akut dalam sistem politik bangsa ini. Prinsip moral dalam hidup berbangsa dan bernegara sudah tidak dhiraukan lagi.

Sebetulnya aliran Machiavellian sudah merasuki jiwa para penguasa negeri ini. Tidak dapat dimungkiri bahwa ada kekeliruan dalam menafsir pandangan Machiavelli tentang pemisahan prinsip-prinsip moral dan politik kekuasaan. Ajaran atau aliran ini sangat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Lalu hal apa saja yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mesti mengembalikan jati diri bangsa Indonesia

¹⁹ Wasito Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1988), hlm. 9.

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Persaudaraan, dan Perdamaian* (Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 211.

sebagai negara demokrasi yang memiliki makna terdalam bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Itu artinya penguasa tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi dan membuat kecurangan demi memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Negara Indonesia bukan negara kerajaan sehingga bisa diterapkan politik dinasti. Negara Indonesia adalah negara Republik yang menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1978
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Poespoprodjo, Wasito. *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktik*. Bandung : Penerbit Remadja Karya, 1988.
- Machiavelli, Niccolo. *Il Principe (Sang Penguasa)*. Terj. Agus Purwanto. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- . *Diskursus*. Terj. Yudi Santoso dan Sovia VP. Yogyakarta : Penerbit Bentang Budaya, 2003.
- Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998.
- . *Berebut Jiwa Bangsa : Dialog, Persaudaraan, dan Perdamaian*. Jakarta : Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- Skinner, Quentin. *Machiavelli : Dilema Kekuasaan dan Moralitas*. Terj. Burhan Wirasubrata. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Maiwan, Mohammad. "Antara Virtue dan Fortune : Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli" *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19 : 1, OKTOBER 2019.
- Fathoni, Riza. "Arsip Foto "Kompas" : Pemilu 2004, Pilpres Langsung Pertama Indonesia", *Kompas*, 30 Desember 2023.
- Tim Infografik, "Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa", *Kompas*, 13 Februari 2024.
- Sahde, Ahmad. "Jokowi, dari Kesempurnaan Demokrasi Menuju Politik Dinasti", *Kompas*, 3 November 2023.